

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul "**Ketimpangan Distribusi Sumber Daya, Kebijakan Ekonomi yang Lemah, serta Dampak Globalisasi**" dengan baik dan tepat waktu.

Makalah ini disusun sebagai bentuk pemahaman dan refleksi terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang tengah dihadapi, baik di tingkat nasional maupun global. Di dalamnya dibahas tentang ketimpangan distribusi sumber daya yang masih menjadi tantangan pembangunan, lemahnya kebijakan ekonomi serta tata kelola pemerintahan, serta dampak globalisasi yang membawapengaruh positif maupun negatif terhadap kehidupan masyarakat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan makalah ini di masa mendatang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan makalah ini.

Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca.

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan .....	2
<b>BAB II. PEMBAHASAN</b> .....	<b>3</b>
A. Pengertian Kemiskinan .....	
B. Teori-Teori Penyebab Kemiskinan.....	
C. Warisan Kolonialisme .....	
D. Ketimpangan Distribusi Sumber Daya .....	
E. Kebijakan Ekonomi dan Pemerintahan yang Lemah .....	
F. Globalisasi dan Dampaknya.....	
<b>BAB III. PENUTUP</b> .....	
A. KESIMPULAN. ....	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kemiskinan merupakan isu kompleks yang telah menjadi perhatian utama dalam pembangunan di negara-negara Asia Tenggara. Meskipun kawasan ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam dua dekade terakhir, kesenjangan sosial dan tingkat kemiskinan masih tetap tinggi di sebagian besar negara. Data dari Asian Development Bank (2022) menunjukkan bahwa jutaan penduduk di Asia Tenggara masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di daerah pedesaan dan kawasan terpencil.

Permasalahan kemiskinan tidak dapat dipahami hanya dari kondisi ekonomi saat ini, tetapi harus ditelusuri hingga ke akar sejarahnya. Warisan kolonialisme menjadi salah satu faktor utama yang membentuk struktur ekonomi dan sosial yang timpang di kawasan ini. Pada masa kolonial, negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam mengalami eksploitasi besar-besaran atas sumber daya alam mereka, di mana hasil kekayaan tersebut sebagian besar dinikmati oleh negara penjajah (Booth, 2003). Proses ini menciptakan struktur ekonomi yang tidak inklusif, dengan ketergantungan tinggi terhadap ekspor komoditas mentah dan rendahnya investasi pada pendidikan serta pembangunan masyarakat lokal.

Selain itu, kebijakan ekonomi yang dijalankan pascakemerdekaan di berbagai negara Asia Tenggara sering kali tidak mampu mengatasi ketimpangan warisan kolonial tersebut. Misalnya, program industrialisasi di Indonesia pada era Orde Baru, meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak diimbangi dengan distribusi kekayaan yang adil (Hill, 1996). Pembangunan yang bersifat sentralistik dan berorientasi pada pertumbuhan makro sering kali mengabaikan pembangunan berbasis komunitas dan daerah, yang menyebabkan kelompok rentan tetap terpinggirkan.

Kondisi kemiskinan juga diperparah oleh lemahnya tata kelola pemerintahan dan tingginya tingkat korupsi. Dalam konteks ini, banyak bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan tidak sampai pada kelompok yang membutuhkan karena adanya kebocoran anggaran dan birokrasi yang tidak efisien (Yusuf & Francisco, 2009). Ini memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dalam mengatasi persoalan-persoalan struktural.

Selain itu, globalisasi yang berlangsung cepat sejak akhir abad ke-20 membawakan tantangan tersendiri. Meskipun membuka akses terhadap pasar dan teknologi, globalisasi juga memperbesar kesenjangan antar kelompok yang memiliki akses terhadap modal dan teknologi dengan mereka yang tidak. Hal ini membuat sebagian masyarakat di Asia Tenggara, terutama yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil, semakin rentan terhadap kemiskinan struktural (UNESCAP, 2018).

Dengan latar belakang inilah, penting untuk mengkaji asal-usul kemiskinan di Asia Tenggara secara menyeluruh. Studi ini tidak hanya menyoroti faktor ekonomi kontemporer, tetapi juga menggali aspek sejarah, politik, dan sosial yang turut membentuk kondisi kemiskinan hari ini. Melalui pendekatan multidimensi, diharapkan kajian ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai permasalahan kemiskinan serta menjadi dasar untuk perumusan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa Pengertian Kemiskinan ?
2. Apa Teori-Teori Penyebab Kemiskinan ?
3. Apa Warisan Kolonialisme ?
4. Bagaimana Ketimpangan Distribusi Sumber Daya ?
5. Bagaimana Kebijakan Ekonomi dan Pemerintahan yang Lemah ?
6. Bagaimana Globalisasi dan Dampaknya ?

## **C. TUJUAN**

1. Untuk mengetahui Apa Pengertian Kemiskinan
2. Untuk mengetahui Apa Teori-Teori Penyebab Kemiskinan
3. Untuk mengetahui Apa Warisan Kolonialisme
4. Untuk mengetahui Bagaimana Ketimpangan Distribusi Sumber Daya
5. Untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan Ekonomi dan Pemerintahan yang Lemah
6. Untuk mengetahui Bagaimana Globalisasi dan Dampaknya

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. PENGERTIAN KEMISKINAN**

Kemiskinan adalah sebuah kondisi sosial-ekonomi yang mencerminkan ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks pembangunan, kemiskinan dipandang sebagai hambatan utama yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan memperlambat kemajuan suatu negara atau wilayah.

Menurut *Todaro dan Smith* (2015), kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merujuk pada kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Sebaliknya, kemiskinan relatif menunjukkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, di mana seseorang dianggap miskin jika pendapatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata masyarakat sekitarnya.

Sementara itu, *World Bank* (2021) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana individu hidup dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan internasional, yakni US\$1,90 per hari (untuk standar ekstrem). Angka ini digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah seseorang berada dalam kondisi sangat miskin secara global.

Di sisi lain, *Sen* (1999) menekankan bahwa kemiskinan tidak hanya menyangkut kekurangan materi, tetapi juga menyangkut kurangnya kemampuan (*capability deprivation*) untuk menjalankan kehidupan yang dianggap bernilai. Dengan kata lain, kemiskinan tidak hanya soal kurangnya pendapatan, melainkan juga tentang terbatasnya akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi sosial, dan kebebasan.

Dalam konteks Asia Tenggara, kemiskinan sering kali bersifat multidimensional, di mana penduduk miskin tidak hanya mengalami kekurangan secara ekonomi, tetapi juga menghadapi kendala struktural seperti rendahnya kualitas pendidikan,

keterbatasan akses terhadap pelayanan publik, serta ketidakadilan dalam distribusi sumber daya (UNDP, 2022). Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk mengukur dan memahami kemiskinan harus komprehensif, tidak hanya menggunakan indikator moneter, tetapi juga mencakup aspek sosial dan struktural.

## **B. TEORI-TEORI PENYEBAB KEMISKINAN**

Untuk memahami penyebab kemiskinan secara menyeluruh, para ekonom dan ilmuwan sosial telah mengembangkan berbagai teori yang mengkaji kemiskinan dari sudut pandang struktural, kultural, hingga individual. Dalam konteks Asia Tenggara, berbagai teori ini dapat digunakan untuk menganalisis kondisi nyata masyarakat, mengingat wilayah ini menghadapi dinamika sejarah, ekonomi, dan politik yang sangat kompleks.

### **1. Teori Struktural**

Teori ini berpandangan bahwa kemiskinan muncul akibat struktur sosial, politik, dan ekonomi yang timpang. Menurut teori ini, kemiskinan bukanlah hasil dari kegagalan individu, melainkan akibat sistem yang menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan (Lewis, 1966). Dalam banyak negara di Asia Tenggara, ketimpangan distribusi lahan, pendidikan yang tidak merata, serta bias kebijakan pemerintah terhadap kelompok tertentu memperkuat teori ini.

Contohnya, sistem ekonomi yang didominasi oleh kelompok elite atau oligarki menyebabkan sebagian besar masyarakat miskin tidak mampu mengakses sumber daya seperti tanah, modal, atau pendidikan. Hal ini membentuk lingkaran setan kemiskinan struktural yang sulit diputus.

“Kemiskinan sering kali tertanam dalam relasi sosial dan struktur ekonomi-politik yang menindas” (Lister, 2004).

### **2. Teori Kultural (Budaya Kemiskinan)**

Teori ini dikembangkan oleh Oscar Lewis (1959), yang menyatakan bahwa kemiskinan bertahap karena terbentuknya budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya ini mencakup nilai-nilai seperti pasrah pada nasib, rendahnya aspirasi pendidikan, serta ketidakpercayaan pada sistem.

Dalam konteks Asia Tenggara, teori ini dapat ditemukan pada kelompok masyarakat yang telah lama terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Misalnya, komunitas adat atau kelompok minoritas etnis yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan

pelayanan pemerintah. Namun, teori ini sering dikritik karena cenderung menyalahkan korban (victim blaming) dan mengabaikan faktor struktural.

### 3. Teori Fungsionalis

Teori ini memandang kemiskinan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tatanan masyarakat. Dalam pandangan fungsionalis (Davis & Moore, 1945), kemiskinan memiliki peran dalam menyediakan tenaga kerja murah dan menjadi motivasi bagi individu lain untuk bekerja keras dan naik ke kelas sosial yang lebih tinggi.

Namun, dalam praktiknya, teori ini tidak cukup menjelaskan mengapa sebagian besar masyarakat tetap berada dalam lingkaran kemiskinan tanpa kesempatan yang adil untuk mobilitas sosial. Di Asia Tenggara, kelompok buruh tani dan pekerja informal sering kali menjadi “penopang ekonomi murah” tanpa perlindungan sosial yang memadai.

### 4. Teori Ketergantungan (Dependency Theory)

Teori ini dikembangkan oleh para pemikir Latin Amerika seperti Andre Gunder Frank (1967), yang menyatakan bahwa negara-negara berkembang, termasuk di Asia Tenggara, tetap miskin karena ketergantungan terhadap negara-negara maju. Ketergantungan ini berbentuk hubungan perdagangan tidak seimbang, utang luar negeri, dan dominasi perusahaan multinasional.

Banyak negara Asia Tenggara mengalami keterikatan terhadap ekspor bahan mentah dan ketergantungan pada investasi asing. Hal ini menghambat pertumbuhan sektor domestik dan membuat kekayaan nasional “bocor” ke luar negeri (Todaro & Smith, 2015).

### 5. Teori Kemiskinan Individual

Berbeda dengan teori struktural, teori ini menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh kelemahan individu, seperti kurangnya keterampilan, pendidikan rendah, atau kurangnya motivasi kerja. Dalam perspektif ini, kemiskinan bisa diatasi melalui pendidikan, pelatihan, dan perubahan perilaku.

Meskipun pendekatan ini relevan dalam program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan, teori ini tidak cukup kuat jika digunakan secara tunggal, karena mengabaikan konteks ketimpangan sistemik dan hambatan sosial-budaya.

#### Analisis Kritis dalam Konteks Asia Tenggara

Dalam kenyataannya, kemiskinan di Asia Tenggara tidak dapat dijelaskan hanya dengan satu teorisasi. Kemiskinan di wilayah ini merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor:

- Kolonialisme menciptakan struktur ekonomi yang eksploitatif.
- Ketimpangan pendidikan dan layanan dasar melanggengkkan kemiskinan struktural.

- Dominasi elite politik dan ekonomimempersempitkesempatanaksesterhadapsumberdaya.
- Budaya lokal dan nilai-nilaisosialterkadangikutmembentukcarapandangterhadapkemiskinan dan peranindividu.

Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner dan multidimensional sangat dibutuhkan dalam memahami serta mengatasi kemiskinan di Asia Tenggara.

### C. WARISAN KOLONIALISME

Salah satuakarhistorisutamakemiskinan di Asia Tenggara adalahwarisankolonialisme. Wilayah inipernahberada di bawahkekuasaanberbagai imperium kolonialseperti Belanda, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Amerika Serikat. Meskipunkolonialismetelahberakhirsecara formal, dampakstruktural, ekonomi, dan sosialnyamasihterusmembekashinggahariini. Kolonialismetidakhanyamerampassumberdayaalam, tetapi juga menciptakansistemekonomi-politik yang timpang dan tidakberpihak pada kepentinganmasyarakatlokal.

#### 1. Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Manusia

Salah satu ciriutamakolonialisme di Asia Tenggara adalaheksplotasibesar-besarterhadapsumberdayaalam. Hutan, tambang, dan lahanpertaniandikendalikanuntukkepentinganekonomi negara kolonial. Sebagai contoh, sistemtanampaksa (*cultuurstelsel*) yang diberlakukan Belanda di Hindia Belanda (Indonesia) memaksapetanimenanamtanamaneksportseperti kopi, tebu, dan nila, yang keuntungannyadibawakeEropa (Elson, 1984).

Selain itu, kolonialisme juga menindastenagakerjalokal dengan sistemkerjapaksa dan upahmurah. Pekerjalokaltidakmendapatkankesempatanuntukmemiliki modal, pendidikan, atautanah, yang kemudianmembatasipeluangmerekauntukberkembangsecaraekonomibahkasetelahkemerdekaan.

#### 2. Kesenjangan Sosial dan Pendidikan

Pemerintahkolonialhanyamenyediakanpendidikanbagisegelintirelitpribumi yang dipersiapkanuntukmenjadibirokratrendah. Akibatnya, mayoritas masyarakatlokaltetapberadadalamkebodohan dan kemiskinanstruktural. Sistempendidikankolonialtidakdirancanguntukmembebaskanataumemberdayakan rakyat, tetapiuntukmelanggengkankontrolkolonial (Benda, 1980).

Di banyak negara Asia Tenggara, warisan ketimpangan pendidikan ini masih terasa. Akses terhadap pendidikan berkualitas masih sangat terbatas bagi kelompok miskin atau daerah terpencil. Ketimpangan ini melanggengkemiskinan antar generasi.

### 3. Pemusatan Ekonomi dan Infrastruktur Kolonial

Pemerintah kolonial umumnya membangun infrastruktur yang mendukung kepentingan ekspor: pelabuhan, jalan kereta api, dan kota-kota administratif. Wilayah pedalaman yang tidak memiliki nilai ekonomis dibiarkan terbelakang. Pola pembangunan yang berorientasi keluar ini menciptakan ketimpangan spasial dan pemusatan ekonomi di wilayah tertentu saja, yang menjadi ciri utama banyak negara di Asia Tenggara sampai hari ini (Booth, 2007).

### 4. Pewarisan Sistem Ekonomi yang Tidak Adil

Setelah kemerdekaan, banyak negara Asia Tenggara mewarisi sistem ekonomi kolonial yang berlandaskan pada monopoli, konsesi asing, dan struktur agraria yang timpang. Di Indonesia, misalnya, ketimpangan kepemilikan lahan yang diwariskan dari zaman kolonial masih menjadi masalah besar di pedesaan. Hal serupa juga terjadi di Filipina dan Myanmar.

Pemerintah pasca-kolonial umumnya gagal melakukan reformasi agraria dan perubahan struktural yang menyeluruh. Hal ini menyebabkan masyarakat miskin tetap terjebak dalam ketimpangan akses terhadap tanah, modal, dan pasar.

Warisan kolonialisme merupakan penyebab struktural utama yang membentuk pola kemiskinan di Asia Tenggara. Sistem ekonomi-politik kolonial telah menciptakan ketimpangan yang mendalam—baik dalam hal distribusi sumber daya, pendidikan, dan infrastruktur—yang terus bertahan bahkan setelah kemerdekaan. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan di wilayah ini harus mempertimbangkan sejarah kolonial secara kritis agar solusi yang ditawarkan tidak bersifat dangkal.

## **D. KETIMPANGAN DISTRIBUSI SUMBER DAYA**

Ketimpangan distribusi sumber daya mengacu pada kondisi tidak meratanya pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam, manusia, maupun ekonomi di suatu wilayah atau antar kelompok masyarakat. Ketimpangan ini dapat memicu kesenjangan sosial, ekonomi, dan pembangunan yang pada akhirnya menghambat tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata.

Beberapa bentuk ketimpangan distribusi sumber daya antara lain:

1. Ketimpangan Sumber Daya Alam (SDA)

Wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti tambang, hutan, atau lahan subur sering kali tidak diiringi dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Sumber daya tersebut cenderung dikelola oleh pihak luar atau perusahaan besar, sementara masyarakat setempat hanya menerima dampak negatif seperti kerusakan lingkungan atau penggusuran.

2. Ketimpangan Ekonomi:

Ketimpangan pendapatan dan kesempatan ekonomi sering kali muncul akibat konsentrasi kepemilikan modal dan usaha pada segelintir orang atau kelompok. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber-sumber ekonomi seperti pekerjaan layak, pendidikan, dan layanan keuangan.

3. Ketimpangan Sumber Daya Manusia:

Akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja yang tidak merata menyebabkan perbedaan kualitas sumber daya manusia antardaerah. Daerah perkotaan cenderung memiliki SDM yang lebih berkualitas dibandingkan pedesaan atau daerah tertinggal, yang berujung pada rendahnya daya saing wilayah tersebut.

4. Ketimpangan Infrastruktur dan Teknologi:

Pembangunan infrastruktur yang tidak merata menyebabkan beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil, tertinggal dalam akses terhadap transportasi, komunikasi, air bersih, dan listrik. Hal ini membatasi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Dampak Ketimpangan Distribusi Sumber Daya

- Meningkatkan kesenjangan sosial dan kemiskinan.
- Memicu konflik sosial dan horizontal antar kelompok atau wilayah.
- Menghambat pertumbuhan ekonomi nasional secara merata.
- Mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Upaya Mengatasi Ketimpangan

- Pemerataan pembangunan infrastruktur antar wilayah.
- Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja.
- Reformasi agraria dan pengelolaan SDA berbasis masyarakat.
- Kebijakan afirmatif untuk daerah tertinggal dan kelompok rentan.

## **E. KEBIJAKAN EKONOMI DAN PEMERINTAHAN YANG LEMAH**

Kebijakan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang lemah menjadi salah satu penyebab utama lambatnya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan di suatu negara. Pemerintahan yang tidak efektif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan berdampak langsung pada ketimpangan sosial, rendahnya investasi, dan kurangnya kepercayaan publik.

### **1. Ciri-Ciri Pemerintahan dan Kebijakan Ekonomi yang Lemah:**

- **Tidak Konsisten dan Tidak Berkelanjutan:**  
Perubahan kebijakan yang terlalu sering atau bertentangan dengan kebijakan sebelumnya menciptakan ketidakpastian yang menghambat dunia usaha dan investasi.
- **Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang:**  
Praktik korupsi yang merajalela melemahkan kepercayaan publik, menghambat pelayanan publik, dan menimbulkan inefisiensi ekonomi.
- **Minimnya Transparansi dan Akuntabilitas:**  
Kurangnya pelaporan dan pengawasan terhadap kebijakan ekonomi serta pelaksanaan anggaran menyebabkan kebocoran dana publik dan ketidakefisienan pembangunan.
- **Kurangnya Partisipasi Publik:**  
Proses pengambilan keputusan yang tidak melibatkan masyarakat membuat kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.
- **Kebijakan yang Tidak Berpihak pada Rakyat Kecil:**  
Kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan pengusaha besar atau investor asing dapat menyingkirkan pelaku ekonomi kecil dan memperbesar ketimpangan.

### **2. Dampak dari Kebijakan dan Pemerintahan yang Lemah:**

- Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antar wilayah.
- Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.
- Menurunnya daya saing nasional.
- Turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
- Terhambatnya investasi, baik domestik maupun asing.

### **3. Solusi dan Upaya Perbaikan:**

- Penguatan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance):  
Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap pengambilan kebijakan.
- Reformasi Birokrasi:  
Memperbaiki sistem kerja, pengawasan, dan pelayanan publik agar lebih efisien, bersih, dan responsif.
- Penyusunan Kebijakan Ekonomi yang Pro-Rakyat:  
Fokus pada pemberdayaan UMKM, subsidi tepat sasaran, dan perlindungan bagi sektor informal.
- Pemberantasan Korupsi Secara Tegas:  
Memperkuat lembaga anti korupsi dan sistem hukum agar mampu menindak tegas pelanggaran hukum tanpa pandang bulu.
- Peningkatan Kapasitas Perencana dan Pembuat Kebijakan:  
Melalui pelatihan, pendidikan, serta penguatan sistem informasi dan data dalam perumusan kebijakan.

## **F. GLOBALISASI DAN DAMPAKNYA**

Globalisasi merupakan suatu proses yang menjadikan dunia semakin terhubung melalui perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan perdagangan internasional. Globalisasi mendorong interaksi antar negara, budaya, dan ekonomi secara lebih terbuka tanpa batas wilayah yang kaku.

### **1. Pengaruh Positif Globalisasi:**

- Kemajuan Teknologi dan Informasi:  
Akses terhadap teknologi modern, internet, dan informasi global semakin mudah, sehingga meningkatkan pengetahuan dan efisiensi dalam berbagai sektor seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan.
- Peningkatan Kerja Sama Internasional:  
Negara-negara dapat menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, budaya, dan keamanan, yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas jaring diplomasi.
- Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi:  
Globalisasi membuka pintu bagi investasi asing (FDI) dan perdagangan internasional yang dapat meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan nasional.
- Ketersediaan Barang dan Jasa yang Lebih Beragam:

Konsumen dapat menikmati produk dari berbagai negara, sehingga pilihan barang dan kualitas meningkat.

## 2. Dampak Negatif Globalisasi:

- **Ketimpangan Ekonomi:**  
Negara atau kelompok yang tidak siap menghadapi arus globalisasi bisa tertinggal. Pelaku usaha kecil bisa kalah bersaing dengan perusahaan multinasional.
- **Erosi Budaya Lokal:**  
Masuknya budaya asing secara masif dapat menggeser nilai-nilai budaya lokal, terutama di kalangan generasi muda.
- **Dominasi Perusahaan Multinasional:**  
Perusahaan besar asing dapat menguasai pasar lokal dan melemahkan ekonomi domestik, terutama UMKM.
- **Ketergantungan Ekonomi:**  
Ketergantungan pada produk dan modal asing membuat suatu negara rentan terhadap krisis global.
- **Masalah Lingkungan:**  
Globalisasi industri sering kali tidak diiringi dengan perlindungan lingkungan yang memadai, sehingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan ekosistem.

## 3. Strategi Menghadapi Dampak Globalisasi:

- **Peningkatan Daya Saing Nasional:**  
Meningkatkan kualitas pendidikan, teknologi, dan sumber daya manusia agar mampu bersaing secara global.
- **Perlindungan terhadap Budaya Lokal:**  
Melalui pendidikan dan promosi budaya, serta pelibatan generasi muda dalam pelestarian budaya.
- **Dukungan untuk UMKM:**  
Memberikan pelatihan, pendanaan, dan akses pasar agar UMKM mampu bersaing di era global.
- **Kebijakan Ekonomi yang Seimbang:**  
Pemerintah perlu mengatur arus investasi dan perdagangan agar tidak merugikan sektor ekonomi nasional.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Ketimpangandalam distribus sumberdaya, lemahnyakebijakanekonomi dan tata kelolapemerintahan, sertapengaruh globalisasimerupakanfaktor-faktorutama yang memengaruhiketidakstabilansosial, ekonomi, dan pembangunansuatu negara. Ketimpangansumberdayamenyebabkanketidakilandalamakses dan pemanfaatanpotensi yang dimilikisuatu wilayah. Sementaraitu, lemahnyakebijakanekonomi dan pemerintahan yang tidakefektifmemperparahkondisitersebut dengan menciptakanketidakpastian, korupsi, sertarendahnyapelayanan publik.

Globalisasi, meskipunmembawadampakpositifdalambentukkemajuanteknologi dan pertumbuhanekonomi, juga menghadirkantantanganbesarsepertiketimpanganekonomi global, ancamanterhadapbudayalokal, dan ketergantunganekonomi pada pihakasing. Oleh karenaitu, diperlukan strategi yang terintegrasiuntukmengatasiberbagaitantanganini, melaluipeningkatankualitassumberdayam manusia, perbaikan tata kelolapemerintahan, perlindunganterhadappekerjaekonomikecil, sertapelestarianbudayabangsa.

Dengan komitmenkuatdarisemuapihak, diharapkanpembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutandapatterwujud di tengahdinamika global yang terusberkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2020). *Laporan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia*. Diakses dari <https://www.bappenas.go.id>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Kebijakan Fiskal dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kusnadi, D. (2022). *Globalisasi dan Tantangan Ketahanan Budaya Lokal*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/kusnadidarmawan/623456/globalisasi-dan-ketahanan-budaya>
- Liputan6. (2023). *Ketimpangan Ekonomi di Indonesia Masih Tinggi, Ini Penyebabnya*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5204567>
- Nurhadi, M. (2021). *Pemerintahan yang Lemah dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Nasional*. Diakses dari <https://tirto.id/pemerintahan-lemah-dampak-ekonomi-gj4N>
- Siregar, H. (2022). *UMKM dan Tantangan di Era Globalisasi Ekonomi Digital*. Diakses dari <https://katadata.co.id>